



# Raperda APBD DKI 2023 Ditetapkan Rp 82,54 Triliun

## ■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Eksekutif dan legislatif menyetujui besaran rancangan APBD DKI 2023 di angka Rp 82,54 triliun. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah disetujui di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11).

Setelah kedua belah pihak setuju, kata dia, pembahasan anggaran bakal dibawa ke setiap komisi di DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Semua aspirasi tadi dari anggota DPRD nanti dibahas di setiap komisi," kata Heru di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Heru, proyeksi APBD DKI tahun depan naik 0,09 persen dibandingkan tahun ini yang berjumlah Rp 82,47 triliun. Dia memerinci, total dana pembangunan untuk 2023 dibagi beberapa program pokok. Pertama, kata dia, subjek pendapatan daerah anggaran 2023 yang direncanakan mencapai Rp 74,41 triliun. Jumlah itu diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah

(PAD) sebesar Rp 52,68 triliun, pendapatan transfer Rp 18,45 triliun, dan pendapatan daerah yang sah senilai Rp 3,27 triliun.

Sementara untuk belanja daerah, Heru melanjutkan, ditetapkan sebanyak Rp 74,34 triliun. Nilai itu berasal dari belanja operasi Rp 60,18 triliun, belanja modal Rp 10,94 triliun, belanja tidak terduga Rp 2,85 triliun, dan belanja transfer Rp 356 miliar. "Untuk penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 8,12 triliun, yang berasal dari Sil-PA (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan) tahun lalu senilai Rp 6,70 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 1,42 triliun," ujar eks wali kota Jakarta Utara tersebut.

Heru melanjutkan, untuk pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan sebesar Rp 8,19 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Alokasi anggaran berupa penyertaan modal daerah (PMD) Rp 6,23 triliun, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,78 triliun, serta anggaran selain pemberian pinjaman daerah fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) Rp 176 miliar.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, rapat paripurna dimulai lebih dulu dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023. Dia menyampaikan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas secara detail tentang mata anggaran sejak awal.

Kedua belah juga akhirnya sepakat menyetujui APBD DKI 2023 ditetapkan Rp 82,54 triliun. "Hal ini menjadi cerminan baik antara DPRD dan Pemprov DKI serta adanya kesepakatan kedua belah pihak terhadap transparansi anggaran publik," ujar politikus PDIP itu.

Melalui Surat Nomor 691/UD.02.00 tertanggal 8 November 2022, kata Prasetyo, diajukan permohonan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023 lebih jauh oleh dewan nantinya. Dengan demikian, nantinya dewan dan Pemprov DKI bisa langsung menyetujui nominal APBD setelah melalui pembahasan di tingkat komisi dan SKPD terkait.

■ ed: erik purnama putra